

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
(Studi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling)**

(Skripsi)

Oleh

**YUYUN DWI LESTARI
NPM 2116021075**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN (Studi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling)

Oleh

YUYUN DWI LESTARI

Permasalahan penelitian muncul dari ketidaksesuaian antara hasil evaluasi dan pemilihan kelurahan untuk mewakili lomba tingkat provinsi. Kelurahan Sumberrejo Sejahtera hanya menempati peringkat ke-62 dari seluruh kelurahan di Kota Bandar Lampung, Kelurahan Sumberrejo Sejahtera terpilih sebagai perwakilan, sedangkan kelurahan lain dengan skor lebih tinggi tidak dipilih. Hal ini menimbulkan dugaan kurangnya transparansi dan objektivitas dalam proses evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (dalam Subarsono 2011 dan Pramono 2020), yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan telah didukung komunikasi yang baik. Dinas PMK menyampaikan informasi melalui sosialisasi, pelatihan, dan media digital. Arahan bersifat jelas dan konsisten, mempermudah pemahaman pelaksana terhadap indikator EPDESKEL. Sumber Daya di kelurahan memiliki kompetensi yang cukup, terbukti mampu mengoperasikan sistem EPDESKEL. Fasilitas seperti jaringan internet dan perangkat lunak juga mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Pada bagian disposisi atau sikap pelaksana masih ditemukan celah dalam integritas dan transparansi data. Pemilihan kelurahan unggulan tidak sejalan dengan hasil evaluasi, menunjukkan lemahnya akuntabilitas pengambil kebijakan. Kemudian pada struktur birokrasi, SOP telah diterapkan dengan pembagian tugas yang jelas. Kelemahan masih terdapat pada koordinasi lintas bidang serta transparansi dalam penentuan kelurahan unggulan menunjukkan perlunya evaluasi yang berbasis bukti nyata dan sistem pengawasan yang ketat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; EPDESKEL; Kelurahan Sumberrejo Sejahtera

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS REGULATION NUMBER 81 OF 2015 CONCERNING VILLAGE AND SUB-DISTRICT DEVELOPMENT EVALUATION (Study of Sumberrejo Sejahtera Village, Kemiling District)

By

YUYUN DWI LESTARI

The research problem arose from the discrepancy between the evaluation results and the selection of sub-districts to represent the provincial level competition. Sumberrejo Sejahtera Sub-district was only ranked 62nd out of all sub-districts in Bandar Lampung City, Sumberrejo Sejahtera Sub-district was selected as a representative, while other sub-districts with higher scores were not selected. This raises suspicions of low transparency and objectivity in the evaluation process. This study aims to see how the implementation of the policy of the Minister of Home Affairs Regulation Number 81 of 2015 concerning the Evaluation of Village and Sub-district Development in Sumberrejo Sejahtera Sub-district, Kemiling District. This study uses a qualitative method with descriptive techniques with interview, observation, and documentation techniques. The theory used is the policy implementation theory from George C. Edwards III (in Subarsono 2011 and Pramono 2020), which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study are that policy implementation has been supported by good communication. The PMK Office conveys information through socialization, training, and digital media. The directions are clear and consistent, making it easier for implementers to understand the EPDESSEL indicators. Resources in the sub-district have sufficient competence, proven to be able to operate the EPDESSEL system. Facilities such as internet networks and software also support the smooth implementation of policies. In the disposition or attitude of the implementer, there are still gaps in data integrity and transparency. The selection of superior sub-districts is not in line with the evaluation results, indicating weak accountability of policy makers. Then in the bureaucratic structure, SOPs have been implemented with a clear division of tasks. Weaknesses still exist in cross-sector coordination and transparency in determining superior sub-districts, indicating the need for evaluations based on real evidence and a strict monitoring system.

Keywords: Policy Implementation; EPDESSEL; Sumberrejo Sejahtera Village

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
(Studi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling)**

Oleh

YUYUN DWI LESTARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN (STUDI KELURAHAN SUMBERREJO SEJAHTERA KECAMATAN KEMILING)**

Nama Mahasiswa : **Yuyun Dwi Lestari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021075**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



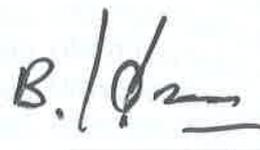
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Tabah Maryanah
Tabah Maryanah

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Budi Harjo, S.Sos., M.IP.



Penguji Utama : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustha Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Juni 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan



Yuyun Dwi Lestari
NPM 2116021075

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Yuyun Dwi Lestari, lahir di Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 20 Juni 2002. Peneliti merupakan putri dari pasangan Bapak Sriono dan Ibu Tukini, dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Peneliti memiliki satu orang kakak perempuan dan satu orang adik lelaki yang bernama Dian Oktaviani dan Muhammad Arkhan Aldebaran. Sebelum menyelesaikan masa pendidikan di jenjang sarjana, penulis telah menyelesaikan pendidikan formal. Jenjang pendidikan peneliti dimulai dari Pendidikan Taman Kanak (TK) Ar-Ridho yang diselesaikan tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN Sidoarjo pada Tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Baradatu yang diselesaikan pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 1 Baradatu pada tahun 2020. Pada tahun 2021 peneliti diterima sebagai salah satu mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa Peneliti pernah menjadi anggota magang Biro Kewirausahaan HMJ Ilmu Pemerintahan tahun 2022 dan menjadi anggota Biro Hubungan Luar dan Alumni tahun 2023. Pada tahun 2024 Peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Tiuh Toho, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian Peneliti melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Magang Mandiri di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota (PMK) Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Qs. Al-Baqarah: 286)

“Perang telah usai, aku bisa pulang
kubaringkan panah dan berteriak MENANG!”

(Nadin Amizah)

“Angan-angan yang dulu mimpi belaka,
Kita gapai segala yang tak disangka”

(Hindia)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas ridha dan kasih-Nya, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang syafa'atnya senantiasa dinantikan di Yaumul Akhir.

Skripsi ini kupersembahkan kepada
Kedua Orang Tua Tercinta
Bapak Sriono dan Alm. Ibu Tukini

Serta Saudara Kandungku
Mbak Dian Oktaviani dan Adik Muhammad Arkhan Aldebaran

Yang selalu berikhtiar dan berdoa untukku. Segala cinta, pengorbanan, dan dukungan kalian yang tidak ternilai.

Terimakasih untuk semua yang telah mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan keberkahan.

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji dan syukur panjatkan Peneliti atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Studi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling).**" Tak lupa Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi umat manusia.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Peneliti melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademisi;

4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan selaku Dosen Penguji peneliti yang telah banyak membantu memberikan arahan, waktu, motivasi serta saran-saran yang positif dalam proses penyelesaian skripsi ini. Peneliti ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki, serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dosen PA peneliti yang telah banyak membantu memberikan arahan positif dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki, serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP., selaku Dosen Pembimbing Peneliti. Terima kasih atas bimbingan selama ini yang sangat detail dalam menuliskan skripsi Peneliti agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi. Terima kasih telah banyak membantu memberikan masukan, Arah, waktu, motivasi, dan ilmu yang sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat Peneliti kepada bapak dan ibu semua. Peneliti sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup Peneliti.
9. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasLampung. Terima kasih telah membantu Peneliti dalam hal administrasi perkuliahan selama ini.
10. Untuk Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling, khususnya seluruh perangkat kelurahan. Terima kasih karena telah menerima dan membantu Peneliti dalam keseluruhan proses termasuk memperoleh data

dalam penyusunan penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan para nasarumber dalam skripsi ini.

11. Seluruh keluarga besar Dinas PMK Kota Bandar Lampung. Bapak Yustam, Bapak Syafril, Bapak Heri, Bapak Abe, Mba Nining, Mba Rika, Mba Merna, Mba Intan, Bang Rahul, Bang Bendi dan staff lainnya meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat Peneliti kepada bapak dan ibu staff semuanya. Terima kasih atas segala bentuk bantuan dan dukungan kepada penulis, bail semasa magang maupun selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada informan penelitian dari akademisi Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara, Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si dan Bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA. Terima kasih telah memberikan kesempatan serta kemudahan kepada penulis untuk memperoleh informasi dan ilmu terkait substansi skripsi penulis.
13. Dengan penuh cinta kasih sayang dan rasa syukur, Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis. Cinta pertama penulis Bapak Sriyono dan wanita tercantik pintu surgaku Alm. IbuTukini, yang selalu memberikan dukungan, semangat, kesabaran, cinta, kasih sayang, cucuran keringat pengorbanan serta do'a yang tiada hentinya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia, karena penulis menyadari selama ini belum bisa berbuat lebih atas pengorbanan semua ini.

Cinta pertama penulis, Bapak Sriyono. Meski bapak tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun setiap langkahku di dunia pendidikan ini adalah jejak dari doa-doa bapak yang tak pernah putus. Bapak adalah guru sejati dalam kehidupan mengajarku arti kesetiaan, tanggung jawab, dan kerja keras, tanpa pernah meminta balasan selain senyum anak-anakmu. Terima kasih, Bapak, atas peluh yang tak terlihat, atas pengorbanan yang tak terucap, atas semangat yang bapak tiupkan di setiap langkahku. Skripsi ini, dan setiap pencapaian dalam kehidupan, adalah persembahan kecil untuk cinta bapak yang tak ternilai. Semoga

kelak aku mampu menjadi anak yang membanggakan yang bisa mengukir senyuman di wajah bapak, sebagaimana bapak telah mengukir kekuatan di hatiku. Semoga Allah SWT senantiasa memberi bapak kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan untuk terus menemani langkahku hingga akhir hayat.

Wanita tercantik sekaligus pintu surgaku, Alm Ibu Tukini. Sama halnya dengan bapak, Ibu juga tak pernah menginjakkan kaki di bangku perkuliahan, namun Ibu telah menjadi madrasah kehidupan bagiku. Dari pelukmu aku belajar kasih sayang, dari doamu aku tumbuh dalam kekuatan, dan dari senyummu aku mendapat semangat yang tak pernah padam. Terima kasih, Ibu, telah melahirkan, menyusui, membesarkan, dan mencintaiku dengan cinta yang begitu tulus dan tak bersyarat. Hingga usiaku 22 tahun, Ibu selalu ada menemani langkahku, dalam suka maupun duka. Kini Ibu telah berpulang, tapi cintamu tetap hidup dalam setiap detak jantungku. Doaku selalu menyertai. Semoga Allah SWT limpahkan surga paling indah untuk Ibu, tempat Ibu beristirahat dalam damai dan bahagia. Dan jika kehidupan kedua itu benar adanya, izinkan aku kembali menjadi anakmu. Aku ingin kembali bermanja, dan mencicipi masakan Ibu yang penuh cinta.

Aku rindu, Mii. Love you, Mii.

Terima kasih telah menjadi kedua untuk kedua orang tua yang hebat dan sumber kekuatan bagi penulis.

14. Kepada seseorang yang tak kalah penting dalam hidupku, kakak kandung sekaligus panutan dan sahabat jiwa, Mbak Dian Oktaviani, S.Pd. Terima kasih telah menjadi kakak terbaik yang pernah kumiliki. Dalam setiap langkahku di dunia perkuliahan, ada kekuatan dari nasihatmu, ada keberanian yang tumbuh dari semangatmu. Mbak, tidak hanya menjadi tempatku bersandar tapi juga pelita saat aku kehilangan arah. Kasih sayangmu adalah pelukan hangat yang tak selalu terlihat, tapi selalu terasa. Mbak Dian contoh perempuan kuat yang selalu aku banggakan kepada teman-temanku. Terima kasih telah mengajarku menjadi tangguh, untuk

berdiri sendiri namun tak pernah merasa sendiri. Semoga cinta dan hubungan kita sebagai saudara selalu terikat dalam doa dan kasih yang tak akan pernah putus. Terima kasih karena telah selalu ada.

15. Untuk si kecil bungsu yang baru memulai langkahnya di bangku taman kanak-kanak, Adikku tersayang Muhammad Arkan Aldebaran. Terima kasih sudah menjadi pelipur lara, hadirmu selalu membawa canda dan tawa yang menghangatkan hari-hariku di tengah lelah dan tekanan perkuliahan. Dengan ucapan polosmu, “Yuyu kapan pulang?”, adalah tamparan lembut yang mengingatkanku untuk segera menyelesaikan perjuangan ini, agar bisa segera pulang, bermain, dan tertawa bersamamu lagi. Tawa adek adalah semangat mba yuyu, terima kasih karena telah hadir sebagai cahaya yang membuat langkahku terasa lebih ringan.
16. Kepada keluarga besar dari Alm. Kakek Warsito Rejo dan Kakek Sukiman, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Atas doa, dukungan, dan perhatian yang telah diberikan selama perjalanan perkuliahan ini.
17. Sahabat penulis Siti Nurhalizah, S.I.P., terima kasih atas kebersamaan selama masa kuliah. Terima kasih sudah menjadi teman kost yang baik, teman berbagi cerita, suka, dan duka selama di Griya Balong. Semoga hubungan kita selalu terjalin dengan baik, sampai kita tua nanti.
18. Kepada Triana Putri Ayu dan Annisa Agustina, tempat berkeluh kesah penulis, sosok pendengar terbaik dan penghibur penulis ketika sedih. Selalu menjadi penyemangat dan dua sosok *partner* berkeliling Kota Bandar Lampung. Semoga hubungan kita selalu terjalin dengan baik, sampai kita tua nanti.
19. Sobat ceria (Mhs Akhir *Family*) seperjuangan penyemangat penulis, Triana Putri Ayu, Mustika Ayu Alsa, S.I.P., Annisa Agustina, S.I.P., Siti Nurhalizah, S.I.P., Patri Resna, S.I.P., Siti Dwi Lestari, Puput Cahya Dewi, Adinda Eka Listiara, Cinta Samosir. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, doa, dan keceriaan yang telah kalian berikan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, semangat, dan tawa di tengah

kesibukan kuliah.. Semoga hubungan ini tetap terjaga dan silaturahmi kita terus berlanjut hingga nanti.

20. Sobat Lamtur, Rizqi Harlian Mulyo, Rizki Aditia, Nico Alifiansyah, Siti Nurhalizah, S.I.P. Kehadiran kalian benar-benar jadi penghibur dan penyemangat dalam perjalanan ini. Lamtur hadir membawa tawa, semangat, dan rasa kebersamaan yang luar biasa. Semoga hubungan baik ini terus terjaga. Slogan lamtur "Temenan sampe kaya" semoga tercapai semua cita-cita sobat lamtur.
21. Kepada teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan kebersamaan dalam suka duka selama perkuliahan.
22. Kepada teman-teman "KKN Tiuh Toho, 2024." Alya, Farel, Pawang, Afif, Rafli, Ranti dan juga Pak Abdurohman, Ibu Mardiyah serta masyarakat Kampung Tiuh Toho. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juni 2025

Penulis

Yuyun Dwi Lestari

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR SINGKATAN | xii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 15 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 15 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 15 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| 2.1 Teori Kebijakan Publik..... | 17 |
| 2.1.1 Pengertian Kebijakan | 17 |
| 2.1.2 Konsep Kebijakan Publik..... | 20 |
| 2.1.3 Ciri-Ciri Kebijakan Publik..... | 20 |
| 2.1.4 Tahapan Proses Kebijakan Publik..... | 21 |
| 2.2 Tinjauan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESSEL).. | 29 |
| 2.2.1 Definisi Evaluasi | 29 |
| 2.2.2 Definisi Perkembangan Desa/Kelurahan | 30 |
| 2.3 Kerangka Berpikir..... | 31 |
| III. METODE PENELITIAN | 33 |
| 3.1 Tipe Penelitian | 33 |
| 3.2 Lokasi Penelitian..... | 33 |
| 3.3 Fokus Penelitian..... | 34 |
| 3.4 Jenis Data | 35 |
| 3.5 Informan Penelitian..... | 36 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| 3.7 Teknik Pengolahan Data | 40 |
| 3.8 Teknik Analisis Data..... | 41 |
| 3.9 Teknik Keabsahan Data | 43 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN | 45 |
| 4.1 Hasil | 45 |
| 4.1.1 Gambaran Umum EPDESSEL | 45 |
| 4.1.2 Tujuan EPDESSEL | 46 |
| 4.2 Pembahasan..... | 47 |
| 4.2.1 Implementasi EPDESSEL pada Kelurahan Sumberrejo Sejahtera..... | 49 |

| | |
|------------------------------------|----|
| V. SIMPULAN DAN SARAN | 85 |
| 5.1 Simpulan | 85 |
| 5.2 Saran | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 89 |
| LAMPIRAN | 93 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Penilaian Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung Tahun 2024 | 6 |
| 2. Data Nama Informan..... | 37 |
| 3. Hasil temuan lapangan berdasarkan penelitian | 82 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 1. Grafik hasil EPDESKEL Kelurahan Sumberrejo Sejahtera | 11 |
| 2. Kerangka Berpikir..... | 32 |
| 3. Sosialisasi Penginputan Data EPDESKEL Kota Bandar Lampung..... | 55 |
| 4. Hasil Perkembangan EPDESKEL Kelurahan Sumberrejo | 60 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-------------|--|
| EPDESKEL | : Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan |
| OPD | : Organisasi Perangkat Daerah |
| PERMENDAGRI | : Peraturan Dalam Negeri |
| PMK | : Pemberdayaan Masyarakat Kota |
| SOP | : <i>Standard Operating Procedure</i> |
| UU | : Undang-Undang |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menganut sistem otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah ini diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat diwujudkan melalui berbagai langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di berbagai sektor kegiatan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan semua potensi sumber daya yang dimiliki (Wenda & Akib, 2015).

Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan cara yang lebih adaptif dan responsif. Dalam kerangka ini, pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat krusial, karena menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan publik dapat diberikan kepada masyarakat. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan umum dan regulasi nasional yang harus diikuti oleh semua daerah, sementara pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini memungkinkan daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rukayat, 2017).

Daerah dengan sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, dan akses terhadap pendanaan yang lebih luas memiliki keunggulan kompetitif dalam mengelola pembangunan. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan sumber daya seringkali kesulitan untuk menarik investasi, mengakses teknologi, dan membangun kapasitas lokal. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana daerah yang sudah maju semakin maju, sementara daerah yang tertinggal semakin tertinggal. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung pemerataan pembangunan, termasuk penyusunan indikator yang jelas untuk menilai perkembangan daerah. Dengan begitu, pembangunan daerah tertinggal dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan di Indonesia (Sulaeman & Andriyanto, 2021).

Kementerian Dalam Negeri telah melahirkan sebuah inovasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan merupakan tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Ditetapkan pada 30 Desember 2015, peraturan ini memberikan kerangka acuan yang jelas dalam menilai sejauh mana desa dan kelurahan telah berhasil dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya, mendorong pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini bertujuan untuk memetakan capaian pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah dapat mengidentifikasi desa-desa yang telah berhasil serta desa-desa yang masih memerlukan dukungan lebih lanjut. Selain itu, evaluasi ini juga berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan.

Platform digital ini memungkinkan pemerintah desa atau kelurahan untuk secara *real-time* menginput dan memperbarui data mengenai kondisi desa atau kelurahannya. Dengan demikian, Kementerian Dalam Negeri dapat

melakukan pemantauan dan pengawasan secara lebih efektif dan efisien. Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuannya memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data dari seluruh desa di Indonesia, terutama bagi desa-desa yang berada di daerah terpencil. *Website* ini dirancang khusus untuk memfasilitasi pengisian data desa dan kelurahan (Al-Aslam, 2022).

Dalam konteks pemerintah, penerapan teknologi bermula dari adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang penerapan *electronic government*. Penerapan *e-government* pada pemerintah desa menjadi tujuan utama dalam mendorong desa ke arah kemajuan (Ridhawati, 2019). Hal ini memungkinkan dilakukannya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, serta identifikasi dini terhadap permasalahan yang dihadapi oleh desa/kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa *website* ini tidak hanya sekedar alat pelaporan data, namun telah merombak secara signifikan cara pemerintah pusat dan daerah berinteraksi dalam konteks evaluasi dan pengembangan desa serta kelurahan. EPDESKEL menawarkan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Sebelumnya, proses evaluasi melibatkan tim dari berbagai level pemerintahan yang harus secara langsung mengunjungi setiap desa dan kelurahan untuk mengumpulkan data secara manual. Proses ini tidak hanya memakan waktu yang lama, tetapi juga rentan terhadap kesalahan dan inkonsistensi data.

Permendagri No. 8 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEL) mengatur mekanisme untuk menilai perkembangan desa dan kelurahan berdasarkan indikator tertentu. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Setelah data terisi, sistem akan secara otomatis menghasilkan skor atau nilai yang menunjukkan tingkat perkembangan desa. Skor ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi desa-desa yang perlu mendapatkan perhatian khusus, serta untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang

lebih tertarget. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan, maupun pendampingan teknis. *Website* EPDESKEL diterapkan untuk komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat berbagi data dan informasi secara *real-time*, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat. (Al-Aslam, 2022).

Aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi ini sangat komprehensif, meliputi: penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, evaluasi ini tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif seperti jumlah pembangunan fisik, tetapi juga pada aspek kualitatif seperti partisipasi masyarakat, kualitas hidup, dan nilai-nilai kearifan lokal. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran, prioritas pembangunan, serta pemberian penghargaan dan sanksi bagi pemerintah desa dan kelurahan. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong desa dan kelurahan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Aziz, 2023).

Selain itu, penulis juga berpendapat EPDESKEL juga memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Data yang terkumpul secara sistematis dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran. Pemerintah pusat dapat dengan mudah mengidentifikasi desa-desa yang memerlukan dukungan tambahan, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Secara keseluruhan, EPDESKEL telah membawa perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. *Website* EPDESKEL tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan evaluasi, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Pemikiran Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno (2013), menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan. Namun, tidak terpenuhinya indikator dalam EPDESKEKEL, meskipun telah diberikan skor atau nilai, dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, baik bagi desa dan kelurahan maupun bagi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Salah satu risiko terbesar adalah potensi manipulasi data. Jika desa dan kelurahan merasa tertekan untuk mencapai target tertentu, mereka mungkin tergoda untuk memalsukan data atau menggelembungkan capaian yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan mengaburkan gambaran sebenarnya mengenai kondisi desa/kelurahan dan menghambat upaya perbaikan. Penulis berpendapat, ketidaksesuaian antara indikator yang ditetapkan dengan capaian yang sebenarnya juga dapat menyebabkan kesenjangan yang signifikan. Indikator yang tidak relevan atau tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan akan membuat upaya pembangunan menjadi tidak efektif.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat kelurahan tercermin melalui evaluasi perkembangan kelurahan. Suatu kelurahan dianggap berkembang jika mampu memenuhi semua indikator yang tercantum dalam evaluasi tersebut. Hasil dari evaluasi inilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan (Yola, 2021). Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung dan secara administratif terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan telah mengimplementasikan *website* EPDESKEKEL. Sosialisasi EPDESKEKEL yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Kota Bandar Lampung telah menjadi langkah awal dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan anggaran desa dan kelurahan, serta terukurnya keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Berikut ini penulis tampilkan hasil normatif evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di Kota Bandar Lampung tahun 2024:

Tabel 1. Penilaian Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung Tahun 2024

| No. | Kecamatan | Kelurahan | Nilai | Tingkat Berkembang |
|-----|---------------------|--------------------|-------|--------------------|
| 1. | Enggal | Pelita | 399 | Cepat berkembang |
| 2. | Sukarame | Korpri Raya | 398 | Cepat berkembang |
| 3. | Kemiling | Sumber Rejo | 395 | Cepat berkembang |
| 4. | Tanjung Seneng | Way Kandis | 394 | Cepat Berkembang |
| 5. | Kemiling | Sumber Agung | 394 | Cepat Berkembang |
| 6. | Kedamaian | Kalibalau Kencana | 393 | Cepat Berkembang |
| 7. | Tanjungkarang Timur | Kota Baru | 392 | Cepat Berkembang |
| 8. | Kedaton | Sidodadi | 391 | Cepat Berkembang |
| 9. | Kedamaian | Tanjungraya | 391 | Cepat Berkembang |
| 10. | Kedaton | Kedaton | 388 | Cepat Berkembang |
| 11. | Telukbetung Utara | Sumur Batu | 388 | Cepat Berkembang |
| 12. | Tanjung Senang | Tanjung Senang | 387 | Cepat Berkembang |
| 13. | Kemiling | Kemiling Permai | 387 | Cepat Berkembang |
| 14. | Tanjungkarang Pusat | Durian Payung | 386 | Cepat Berkembang |
| 15. | Rajabasa | Rajabasa Jaya | 386 | Cepat Berkembang |
| 16. | Tanjungkarang Barat | Kelapa Tiga Permai | 384 | Cepat Berkembang |
| 17. | Telukbetung Utara | Kupang Teba | 384 | Cepat Berkembang |
| 18. | Telukbetung Timur | Kota Karang Raya | 382 | Cepat Berkembang |
| 19. | Tanjungkarang Barat | Sukajawa | 382 | Cepat Berkembang |
| 20. | Rajabasa | Gedong Meneng Baru | 381 | Cepat Berkembang |
| 21. | Enggal | Rawalaut | 381 | Cepat Berkembang |
| 22. | Tanjungkarang Timur | Kebon Jeruk | 380 | Cepat Berkembang |
| 23. | Kemiling | Kedaung | 380 | Cepat Berkembang |
| 24. | Kedamaian | Kedamaian | 379 | Cepat |

| No. | Kecamatan | Kelurahan | Nilai | Tingkat Berkembang |
|-----|---------------------|-------------------|-------|---------------------|
| 25 | Tanjungkarang Pusat | Pasir Gitung | 378 | Berkembang Cepat |
| 26 | Tanjungkarang Barat | Susunan Baru | 377 | Berkembang Cepat |
| 27 | Tanjungkarang Timur | Tanjung Agung | 377 | Berkembang Cepat |
| 28 | Enggal | Enggal | 376 | Berkembang Cepat |
| 29 | Kedaton | Surabaya | 375 | Berkembang Cepat |
| 30 | Tanjung Senang | Labuhan Dalam | 374 | Berkembang Cepat |
| 31 | Labuhan Ratu | Kota Sepang | 374 | Berkembang Cepat |
| 32 | Kedamaian | Tanjungagung Raya | 373 | Berkembang Cepat |
| 33 | Enggal | Tanjungkarang | 372 | Berkembang Cepat |
| 34 | Kedaton | Sukamenanti | 371 | Berkembang Cepat |
| 35 | Tanjungkarang Barat | Sukadana Ham | 371 | Berkembang Cepat |
| 36 | Enggal | Gunungsari | 370 | Berkembang Cepat |
| 37 | Rajabasa | Rajabasa | 369 | Berkembang Cepat |
| 38 | Enggal | Pahoman | 368 | Berkembang Cepat |
| 39 | Sukarame | Way Dadi | 366 | Berkembang Cepat |
| 40 | Labuhan Ratu | Labuhan Ratu Raya | 366 | Berkembang Cepat |
| 41 | Kedaton | Penengahan | 365 | Berkembang Cepat |
| 42 | Tanjungkarang Barat | Sukajawa Baru | 365 | Berkembang Cepat |
| 43 | Kemiling | Kemiling Raya | 365 | Berkembang Cepat |
| 44 | Sukarame | Way Dadi | 363 | Berkembang Cepat |
| 45 | Tanjungkarang Barat | Segalamider | 362 | Berkembang Cepat |
| 46 | Rajabasa | Rajabasa Pemuka | 362 | Berkembang Cepat |
| 47 | Kemiling | Pinang Raya | 362 | Berkembang Cepat |
| 48 | Bumiwaras | Garuntang | 360 | Berkembang Cepat |
| 49 | Panjang | Panjang Selatan | 359 | Berkembang Cepat |

| No. | Kecamatan | Kelurahan | Nilai | Tingkat Berkembang |
|-----|---------------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 50 | Panjang | Way Lunak | 359 | Berkembang Cepat |
| 51 | Sukabumi | Way Laga | 359 | Berkembang Cepat |
| 52 | Tanjung Senang | Pematang Wangi | 358 | Berkembang Cepat |
| 53 | Sukabumi | Nusantara Permai | 358 | Berkembang Cepat |
| 54 | Bumi Waras | Kangkung | 358 | Berkembang Cepat |
| 55 | Telukbetung Selatan | Sumur Putri | 357 | Berkembang Cepat |
| 56 | Kedaton | Sukamenanti Baru | 355 | Berkembang Cepat |
| 57 | Panjang | Karang Maritim | 355 | Berkembang Cepat |
| 58 | Labuhan Ratu | Kampung Baru | 353 | Berkembang Cepat |
| 59 | Panjang | Ketapang Kuala | 353 | Berkembang Cepat |
| 60 | Tanjung Senang | Perumnas Way Kandis | 353 | Berkembang Cepat |
| 61 | Sukabumi | Campang Raya | 353 | Berkembang Cepat |
| 62 | Kemiling | Sumberrejo Sejahtera | 353 | Berkembang Cepat |
| 63 | Labuhan Ratu | Kampung Baru raya | 353 | Berkembang Cepat |
| 64 | Kedamaian | Tanjunggading | 353 | Berkembang Cepat |
| 65 | Way Halim | Jagabaya II | 351 | Berkembang Cepat |
| 66 | Telukbetung Timur | Sukamaju | 351 | Berkembang Cepat |
| 67 | Rajabasa | Gedong Meneng | 350 | Berkembang Cepat |
| 68 | Langkapura | Gunungterang | 350 | Berkembang |
| 69 | Tanjungkarang Pusat | Gotong Royong | 349 | Berkembang |
| 70 | Telukbetung Selatan | Telukbetung | 349 | Berkembang |
| 71 | Labuhan Ratu | Sepang Jaya | 348 | Berkembang |
| 72 | Telukbetung Timur | Kota Karang | 347 | Berkembang |
| 73 | Sukarame | Sukarame | 347 | Berkembang |
| 74 | Telukbetung Utara | Pengajaran | 347 | Berkembang |
| 75 | Way Halim | Jagabaya I | 347 | Berkembang |
| 76 | Telukbetung Timur | Way Tataan | 347 | Berkembang |
| 77 | Way Halim | Perumnas Way Halim | 346 | Berkembang |
| 78 | Way Halim | Way Halim Permai | 346 | Berkembang |
| 79 | Sukarame | Sukarame Baru | 344 | Berkembang |

| No. | Kecamatan | Kelurahan | Nilai | Tingkat Berkembang |
|-----|------------------------------|-----------------|-------|----------------------|
| 80 | Sukarame | Korpri Jaya | 343 | Berkembang |
| 81 | Tanjungkarang Pusat | Palapa | 341 | Berkembang |
| 82 | Tanjungkarang Pusat Pusat | Kelapa Tiga | 341 | Berkembang |
| 83 | Tanjungkarang Pusat | Kaliawi Persada | 341 | Berkembang |
| 84 | Telukbetung Selatan | Talang | 338 | Berkembang |
| 85 | Telukbetung Utara | Kupang Raya | 337 | Berkembang |
| 86 | Bumi Waras | Sukaraja | 336 | Berkembang |
| 87 | Kedamaian | Tanjungbaru | 334 | Berkembang |
| 88 | Kemiling | Beringin Jaya | 330 | Berkembang |
| 89 | Kedamaian | Bumi Kedaton | 330 | Berkembang |
| 90 | Kedaton | Penengahan Raya | 329 | Berkembang |
| 91 | Rajabasa | Rajabasa Raya | 329 | Berkembang |
| 92 | Telukbetung Timur | Parwata | 329 | Berkembang |
| 93 | Langkapura | Langkapura | 328 | Berkembang |
| 94 | Labuhan Ratu | Labuhan Ratu | 327 | Berkembang |
| 95 | Bumi Waras | Bumi Waras | 325 | Berkembang |
| 96 | Tanjungkarang Timur | Sawah Brebes | 324 | Berkembang |
| 97 | Telukbetung Selatan | Gunungmas | 323 | Berkembang |
| 98 | Telukbetung Barat | Batuk Putuk | 323 | Berkembang |
| 99 | Telukbetung Selatan | Pesawahan | 318 | Berkembang |
| 100 | Telukbetung Utara | Kupang Kota | 316 | Berkembang |
| 101 | Kemiling | Beringin Raya | 315 | Berkembang |
| 102 | Bumi Waras | Bumi Raya | 314 | Berkembang |
| 103 | Panjang | Ketapang | 312 | Berkembang |
| 104 | Tanjungkarang Pusat | Kaliawi | 302 | Berkembang |
| 105 | Way Halim | Gunungsulah | 290 | Berkembang |
| 106 | Rajabasa | Rajabasa Nunyai | 288 | Berkembang |
| 107 | Way Halim | Jagabaya III | 287 | Berkembang |
| 108 | Panjang | Panjang Utara | 284 | Berkembang |
| 109 | Panjang | Pidada | 274 | Berkembang |
| 110 | Telukbetung Utara | Gulak Galik | 258 | Berkembang |
| 111 | Panjang | Srengsem | 248 | Berkembang |
| 112 | Sukabumi | Sukabumi Indah | 213 | Berkembang |
| 113 | Sukabumi | Way Gubak | 150 | Kurang Berkembang |
| 114 | Sukabumi | Sukabumi | 111 | Kurang Berkembang |
| 115 | Telukbetung Selatan | Gedong Pakuon | 59 | Kurang Berkembang |
| 116 | Telukbetung Barat | Sukarame II | 55 | Kurang Berkembang |
| 117 | Tanjungkarang Barat | Gedong Air | 37 | Kurang Berkembang |

Sumber: Kemendagri(Epdeskel.binapemdes.kemedagri.com.id)

Data diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan data EPDESKEL tahun 2024 yang penulis olah dari *website epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id* dengan *login* menggunakan *username* dan *password* milik Kota Bandar Lampung, dari 126 kelurahan di Kota Bandar Lampung yang melakukan pengisian data EPDESKEL dan terdeteksi dalam *website* tersebut berjumlah 117 kelurahan. Evaluasi ini mengklasifikasikan kelurahan ke dalam tiga kategori berdasarkan poin yang diperoleh dari penilaian tingkat perkembangan, yaitu: kelurahan kurang berkembang dengan poin kurang dari 200, kelurahan berkembang dengan poin antara 201 hingga 350 dan kelurahan cepat berkembang dengan poin lebih dari 351. Kelurahan yang mencapai kategori cepat berkembang berpeluang untuk ikut serta dalam lomba desa dan kelurahan yang diadakan oleh pemerintah setiap tahunnya.

Kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif dalam konteks otonomi daerah di Indonesia yang berada di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas (Robial, 2015). Kelurahan Sumberrejo Sejahtera merupakan salah satu kelurahan di Kota Bandar Lampung yang telah menjadi salah satu pionir dalam implementasi EPDESKEL di Kota Bandar Lampung. Keberhasilannya dalam meraih predikat kelurahan berkembang pada periode 2020 sampai 2023 dan kemudian naik menjadi kelurahan cepat berkembang pada tahun 2024 merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan upaya yang gigih dari pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga menunjukkan efektifitas sistem EPDESKEL dalam mendorong pembangunan kelurahan. Keberhasilan ini bahkan membawa Kelurahan Sumberrejo Sejahtera ke tingkat provinsi sebagai perwakilan Kota Bandar Lampung.

Meskipun Kelurahan Sumberrejo Sejahtera pada tahun 2024 hanya menempati urutan ke-62 di Kota Bandar Lampung dengan skor yang cukup

baik atau kategori kelurahan cepat berkembang, kelurahan ini justru terpilih sebagai perwakilan untuk lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Lampung. Sementara itu, terdapat kelurahan lain yang memiliki skor lebih tinggi namun tidak terpilih. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa proses seleksi yang dilakukan belum sepenuhnya transparan dan objektif. Hal tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem EPDESKEKEL benar-benar mampu merefleksikan kondisi riil di lapangan serta apakah proses evaluasi telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diperlukan peninjauan lebih lanjut terhadap mekanisme seleksi dan evaluasi agar dapat memastikan bahwa penilaian yang dilakukan benar-benar adil, akuntabel, dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.



Gambar 1. Grafik Hasil EPDESKEKEL Kelurahan Sumberrejo Sejahtera
Sumber: Data salinan website EPDESKEKEL Kelurahan Sumberrejo

Berdasarkan data tersebut, grafik hasil EPDESKEKEL Kelurahan Sumberrejo Sejahtera menunjukkan adanya fluktuasi skor dari tahun ke tahun, namun secara keseluruhan adanya peningkatan dari tahun 2017 hingga 2024. Skor yang awalnya 246 pada tahun 2017 secara bertahap meningkat hingga mencapai 354 pada tahun 2024. Kenaikan skor ini mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan di kelurahan tersebut. Berdasarkan data EPDESKEKEL Kota Bandar Lampung, dari 126 kelurahan di Kota Bandar Lampung, Kelurahan Sumberrejo Sejahtera

dipercaya mewakili Kota Bandar Lampung dalam ajang lomba EPDESKEL tingkat Provinsi Lampung.

Meskipun beberapa penelitian telah dilakukan mengenai implementasi aplikasi EPDESKEL, namun penulis berpendapat bahwa terdapat kendala terkait kelengkapan dan ketatnya waktu pelaporan, serta kualitas data yang dilaporkan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi secara komprehensif apakah implementasi kebijakan aplikasi EPDESKEL telah mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang EPDESKEL di kelurahan Kota Bandar Lampung belum berjalan optimal. Masih terdapat beberapa kendala terkait sumber daya manusia, anggaran, koordinasi, dan penggunaan aplikasi yang perlu mendapat perhatian dan upaya perbaikan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana implementasi kebijakan *website* EPDESKEL pada Kelurahan Sumberrejo Sejahtera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat proses implementasi kebijakan *website* EPDESKEL tersebut. Adapun untuk mendukung penelitian ini, diperlukan beberapa tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan atau memiliki fokus sejenis dengan penelitian ini, beberapa penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh Hafidh Sholahuddin Abdul Aziz (2023), penelitian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mengetahui implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini melibatkan observasi, wawancara semi terstruktur, dan

dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan regulasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk sudah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah desa yang cepat berkembang setiap tahunnya. Partisipasi masyarakat dan sumber daya pegawai dinas, kecamatan, serta perangkat desa berperan penting dalam keberhasilan program kegiatan di desa.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amri Juharza., (2020), mengkaji pelaksanaan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan pada pemerintahan desa di Kecamatan Ukui. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian berupa menyelidiki, menggambarkan dan menjelaskan. Hasil dari penelitian ini membandingkan tingkat perkembangan tiga desa. Hasilnya menunjukkan: Ukui Satu Berkembang karena letaknya strategis, aktivitas ekonomi aktif, dan fasilitas umum memadai, Ukui Dua Berpotensi berkembang karena dekat pusat kecamatan dan pendapatan dari minyak, sedangkan Lubuk Kembang Bunga Kurang berkembang karena jauh dari pusat kecamatan, fasilitas terbatas, dan rentan bencana. Perkembangan desa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Desa dengan letak strategis, ekonomi aktif, dan fasilitas lengkap cenderung lebih maju. Sebaliknya, desa dengan kendala geografis, ekonomi lemah, dan fasilitas terbatas cenderung kurang berkembang.
3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dhiaul Fakhri Al-Aslam (2022), mengkaji implementasi kebijakan aplikasi EPDESKEL di Kelurahan Eka Jaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada hambatan yang signifikan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan aplikasi ini dalam proses pengawasan perkembangan desa/kelurahan. Kemudian khususnya pada bagian staf

ditemukan masalah dimana Kepala Seksi Pemerintahan yang menjadi penanggung jawab pengelolaan aplikasi EPDESKEL tingkat kelurahan Eka Jaya kesulitan dalam mengoperasikan penuh aplikasinya. Dalam wawancara diutarakan Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan memiliki tugas yang banyak.

4. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yola Melinda, (2021), mengkaji implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata mengelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ditinjau dari permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Perawang belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri. Sebab masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai sehingga terselenggaranya pemerintahan kelurahan perawang dikatakan cukup baik.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji pelaksanaan suatu kebijakan. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEL) di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling. Fokus penelitian ini lebih terarah pada fenomena unik di mana Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, meskipun hanya menempati urutan ke-62 di Kota Bandar Lampung dengan skor yang cukup baik, justru terpilih sebagai perwakilan dalam lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Lampung, sementara kelurahan lain dengan skor lebih tinggi tidak terpilih. Kondisi

tersebut menimbulkan dugaan bahwa proses seleksi belum sepenuhnya transparan dan objektif, serta menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem EPDESKEL mampu merefleksikan kondisi nyata di lapangan dan apakah proses evaluasi telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna meninjau kembali mekanisme seleksi dan evaluasi yang ada, sehingga dapat memastikan bahwa penilaian yang diberikan benar-benar adil, akuntabel, dan sesuai dengan kondisi faktual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami implementasi kebijakan EPDESKEL serta mengevaluasi apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan di tingkat kelurahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Implementasi Dari Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Pada Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk Menjelaskan Bagaimana Implementasi Dari Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Pada Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling”.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka dapat di ketahui manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang EPDESKEKEL berbasis teknologi di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih baik terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Kelurahan Sumberrejo Sejahtera dapat belajar dari pengalamannya sendiri dan pengalaman kelurahan lain untuk mengembangkan kebijakan yang lebih relevan dan efektif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Iskandar (2012) bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor kebijakan), sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Kebijakan dipahami sebagai suatu tindakan yang mengarahkan pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Widodo, 2007).

Menurut Tachjan (dalam Herdiana, 2018) bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik. Untuk menciptakan pembangunan yang optimal, pemerintah menciptakan beberapa kebijakan yang nantinya digunakan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan utama dan menyelesaikan masalah di masyarakat. Lahirnya suatu kebijakan publik tidak lain karena ada landasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Tidak lain kegunaan kebijakan publik diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang pada awal kebijakan ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*) (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Hugwood & Gunn berdasarkan dalam (Hayat, 2017) berpendapat bahwa kebijakan terdiri dari 10 definisi, yaitu:

1. Kebijakan sebagai merek bidang aktivitas tertentu (sebagai tanda aktivitas bidang). *Branding* atau penamaan kebijakan akan menjadi sebuah kontinum dan menjadi program rutin yang terstruktur dan tertanam dalam kebijakan.
2. Kebijakan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Pernyataan pemerintah mengenai suatu keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan umum dan/atau kepentingan masyarakat, baik untuk memecahkan masalah yang dihadapinya maupun hal-hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Kebijakan sebagai proposal khusus (sebagai proposal khusus). Usulan *bottom-up* atau *top-down* khusus yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Misalnya mengenai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, perlu diambil langkah-langkah konkrit untuk mengambil keputusan yang mengarah pada kebijakan dari pemerintah.
4. Kebijakan sebagai keputusan. Apapun langkah yang diambil pemerintah dalam membuat keputusan, itu adalah kebijakan publik. Pada saat yang sama keputusan pemerintah adalah diam, jadi diam pemerintah adalah sebagai kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah.
5. Kebijakan sebagai bentuk otorisasi resmi (sebagai otorisasi formal). Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal Kebijakan dalam bentuk peraturan serupa dengan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai sah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk menjalankan tugas, asas, dan fungsinya yang dilakukan melalui pengesahan formal. Kebijakan formal biasanya mengikat pemangku kepentingan kebijakan.

6. Kebijakan sebagai program. Program pemerintah merupakan bagian dari kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik formal maupun informal, merupakan suatu kebijakan.
7. Kebijakan sebagai produk (sebagai *output*). Kebijakan sebagai output adalah bahwa setiap kebijakan publik harus memiliki *output* yang diharapkan. *Output* yang dihasilkan oleh program kerja menjadi bagian dari kebijakan publik. Misalnya, ketika peraturan pemerintah tentang penanganan sampah ditetapkan, keluaran peraturan yang dihasilkan menjadi keputusan pengelolaan sampah. Keputusan regulasi ini termasuk dalam kategori kebijakan publik.
8. Kebijakan sebagai hasil akhir (sebagai hasil). Begitu juga dengan hasil sebagai bagian dari kebijakan yang merupakan hasil akhir dari program kerja yang telah dilaksanakan. Hasil akhir dari program atau tindakan pemerintah adalah bagian dari kebijakan.
9. Kebijakan sebagai teori atau model. Dalam pemerintahan, berbagai kajian dan analisis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah menghasilkan keluaran atau outcome yang berbeda untuk dijadikan kebijakan pemerintah.
10. Kebijakan sebagai proses (*as a process*). Sebagai suatu proses, kebijakan akan memiliki keterkaitan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Setiap keputusan atau peraturan memiliki sifat hierarkis antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dan dengan demikian merupakan suatu kerjasama kolektif yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebuah pedoman atau arah tindakan yang dibuat untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan tertentu dalam konteks yang

spesifik. Kebijakan melibatkan berbagai pihak (aktor kebijakan) dan keputusan-keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

2.1.2 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan Publik diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Anggara, 2014). Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang (Anggara, 2014).

Menurut Anggara (2014) kebijakan menjadi suatu konsep meliputi beberapa hal berikut ini:

- a. Ketetapan, ketentuan-ketentuan yang memiliki pengaruh mengikat pada suatu kebijakan.
- b. Maksud, terciptanya suatu kebijakan ialah untuk mencapai tujuan tertentu serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.
- c. Keputusan yang bisa dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan suatu kepentingan.
- d. Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan.

2.1.3 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan tidak serta merta dapat dibedakan dari manajemen; kebijakan mencakup perilaku dan harapan; kebijakan termasuk adanya tindakan maupun tidak adanya tindakan; kebijakan biasanya memiliki hasil akhir yang ingin dicapai; setiap kebijakan memiliki maksud atau tujuan tertentu, tersurat maupun tersirat; kebijakan tersebut muncul dari proses yang berlangsung terus menerus;

kebijakan mencakup hubungan antara dan di dalam organisasi; kebijakan publik berkaitan, meskipun tidak secara eksklusif, dengan peran utama lembaga pemerintah; kebijakan dirumuskan atau ditentukan sendiri (Abdal, 2015).

Secara umum menurut (Affrian, 2012), kebijakan publik selalu menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Ada lima ciri umum kebijakan publik.

1. Setiap kebijakan memiliki tujuan. Mempersiapkan Politik tidak boleh acak atau kebetulan kesempatan untuk mewujudkannya. Jika tidak ada tujuan tidak perlu membuat kebijakan.
2. Kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut juga terkait dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan persoalan masyarakat, yang diarahkan pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang mereka katakan akan mereka lakukan atau ingin lakukan.
4. Kebijakan dapat bersifat pasif, larangan, atau berupa arahan untuk implementasinya.
5. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena mereka memiliki kekuatan untuk memaksa orang untuk mematuhi.

2.1.4 Tahapan Proses Kebijakan Publik

1. Penyusunan Agenda/Agenda Setting

Agenda setting adalah tahap di mana isu-isu yang menarik bagi pemerintah diidentifikasi untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan (Kusumanegara, 2010). Pemerintah menghadapi banyak isu atau masalah (*problem*) di sekitarnya, untuk alasan itu, pemerintah harus memutuskan isu-isu apa yang menjadi dasar kebijakan publik. *Agenda setting* menurut (Winarno, 2008) menunjukkan bahwa ada persyaratan bagi pembuat kebijakan untuk merasa dipilih atau dipaksa untuk

melaksanakan tindakan tertentu. Agenda kebijakan dapat dibedakan dari kebutuhan politik secara umum dan berdasarkan prioritas yang menentukan susunan pokok-pokok agenda utama, mengingat agenda tersebut lebih penting daripada agenda lainnya.

Cobb dan Elder (Winarno, 2008) menegaskan bahwa agenda kebijakan adalah proses dimana kemauan politik diterjemahkan untuk menarik perhatian oleh badan pembuat keputusan. Dengan demikian, Barbara Nelson mengatakan bahwa agenda adalah proses agenda politik yang terjadi ketika pejabat publik, menyadari isu-isu yang muncul, membagi diri untuk perhatian individu dan memobilisasi organisasi mereka untuk menanggapi masalah tersebut. Agenda kebijakan merupakan arena pertarungan yang terjadi di dalam institusi pemerintah.

Menurut Kraft dan Furlong (2020), menjelaskan bahwa *agenda setting* ketika masalah-masalah diakui dan dinyatakan, memusatkan perhatian dan akan memasuki agenda politik. Proses ini meliputi kegiatan pendefinisian masalah yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan dan perumusan masalah yang perlu diterjemahkan oleh pemerintah. Isu tersebut merupakan kondisi perkembangan di dalam masyarakat. Situasi tersebut dirasakan oleh masyarakat atau mayoritas masyarakat sebagai bentuk ketidaknyamanan dan kemudian membangkitkan kesadaran dan minat masyarakat untuk memperbaiki situasi melalui tindakan pemerintah.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi (perumusan) kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi

didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah (Rahayu, 2014).

Menurut Nugroho (2009), formulasi kebijakan adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Membuat atau merumuskan kebijakan yang dikenal dengan formulasi kebijakan bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah, karena dalam hal ini terdapat faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan yang dapat mempengaruhi kebijakan proses pembuatan. Menurut Winarno (2014) dalam formulasi kebijakan terdapat beberapa tahapan, yaitu:

1. Perumusan masalah (*defining problem*)

Dalam menetapkan masalah kebijakan dengan baik, hal itu perlu dilakukan pertama sekali yaitu mengenali dan mendefinisikan masalah dengan baik.

2. Agenda kebijakan

Masuknya suatu masalah dalam agenda kebijakan harus memuat persyaratan, seperti apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. Dalam agenda kebijakan masalah publik akan dibahas untuk para pembaca kebijakan, para pengguna kebijakan seperti; legislatif (DPR), eksekutif (presiden dan para pembantunya), agen-agen pemerintah dan yudikatif.

3. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah

Para peneliti kebijakan dalam memecahkan masalah masyarakat pada kepentingan-kepentingan antara berbagai aktor-aktor yang terlibat dalam perutusan kebijakan.

4. Tahap penetapan kebijakan

Pemilihan alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat di dalamnya pembentukan kebijakan. Tahap selanjutnya yaitu penetapan kebijakan, penetapan kebijakan tersebut berupa undang-undang yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain-lain.

3. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (1975) memberikan pengertian implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencangkup baik usaha-usaha untuk mengadiministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 2008).

Daniel Mazman dan Paul Sabatier (Widodo, 2010) menjelaskan makna implementasi kebijakan yaitu memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Kesimpulannya bahwa implementasi merupakan tahapan dalam proses kebijakan publik yang diharapkan mencapai tujuan yang telah digariskan. Charles O. Jones dalam Widodo (2010), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk

mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu:

- a. Organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c. Aplikasi (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan.

Menurut pandangan George C. Edwards, (Pramono, 2020), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu:

1. *Communication* (komunikasi), Komunikasi merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif tidak hanya melibatkan penyebaran informasi dari atas ke bawah (*top-down*), tetapi juga memastikan bahwa semua pihak mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana, hingga masyarakat, memahami tujuan, prosedur, dan dampak dari kebijakan yang akan diterapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat diukur melalui tiga indikator (Subarsono, 2010) yaitu:
 - a. Transformasi dimensi informasi, transmisi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak

hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- b. Dimensi kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).
 - c. Dimensi konsistensi, diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksanaan kebijakan. Informasi perlu disampaikan kepada kebijakan pelaku agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (kelompok sasaran) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan kebijakan pelaksanaan.
2. *Resources* (sumber daya), sumber daya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi tidak akan efektif apabila sumber-sumber tidak mendukung. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut bukan berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Dalam implementasi sebuah kebijakan, sumber daya dari kebijakan itu harus relatif cukup jumlahnya, mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di

kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan (Subarsono, 2011).

3. *Dispositions* (disposisi), disposisi adalah watak dan karakter yang dimiliki implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Implementator kebijakan harus memiliki inisiatif dalam mendukung ketercapaian sebuah kebijakan tersebut. Hal-hal yang harus dicermati pada variable disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif (Subarsono, 2011).
4. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi), struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasi kebijakan baik antar lembaga maupun dengan lembaga yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan implementasi, kebijakan implementasi bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisien struktur birokrasi. Menurut George C Edward III (Winarno, 2008), terdapat dua karakteristik birokrasi yakni, *Standard Operational Procedure* (SOP) dan Fragmentasi atau strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

4. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir dalam (Widodo, 2008), merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut

estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan (Rahayu P, 2014).

Menurut Lester dan Stewart (Rahayu, 2014), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda.

1. Tugas pertama, adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas pertama ini merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atautah tidak. Bila tidak, faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya? Misalnya apakah karena terjadi kesalahan dalam merumuskan masalah atautah karena faktor-faktor yang lain?
2. Tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas kedua dalam evaluasi kebijakan ini pada dasarnya berkait erat dengan tugas yang pertama. Setelah kita mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui apakah program kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan. Dari sini kita dapat melakukan penilaian apakah program yang dijalankan berhasil atautah gagal? Dengan demikian, tugas kedua dalam evaluasi kebijakan adalah menilai apakah suatu

kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan.

Dari kedua hal yang dipaparkan di atas, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan mengenai arti pentingnya evaluasi dalam kebijakan publik. Pengetahuan menyangkut sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan dapat dijadikan pedoman untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan di masa yang akan datang.

2.2 Tinjauan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESSEL)

2.2.1 Definisi Evaluasi

Menurut Stufflebeam dalam Lababa (2008), evaluasi adalah *"the process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives"*. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan (Yunanda, 2009).

Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Pendapat lain dikemukakan oleh Djaali dan Pudji (2008), evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, proses, orang, objek dll) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan

sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi.

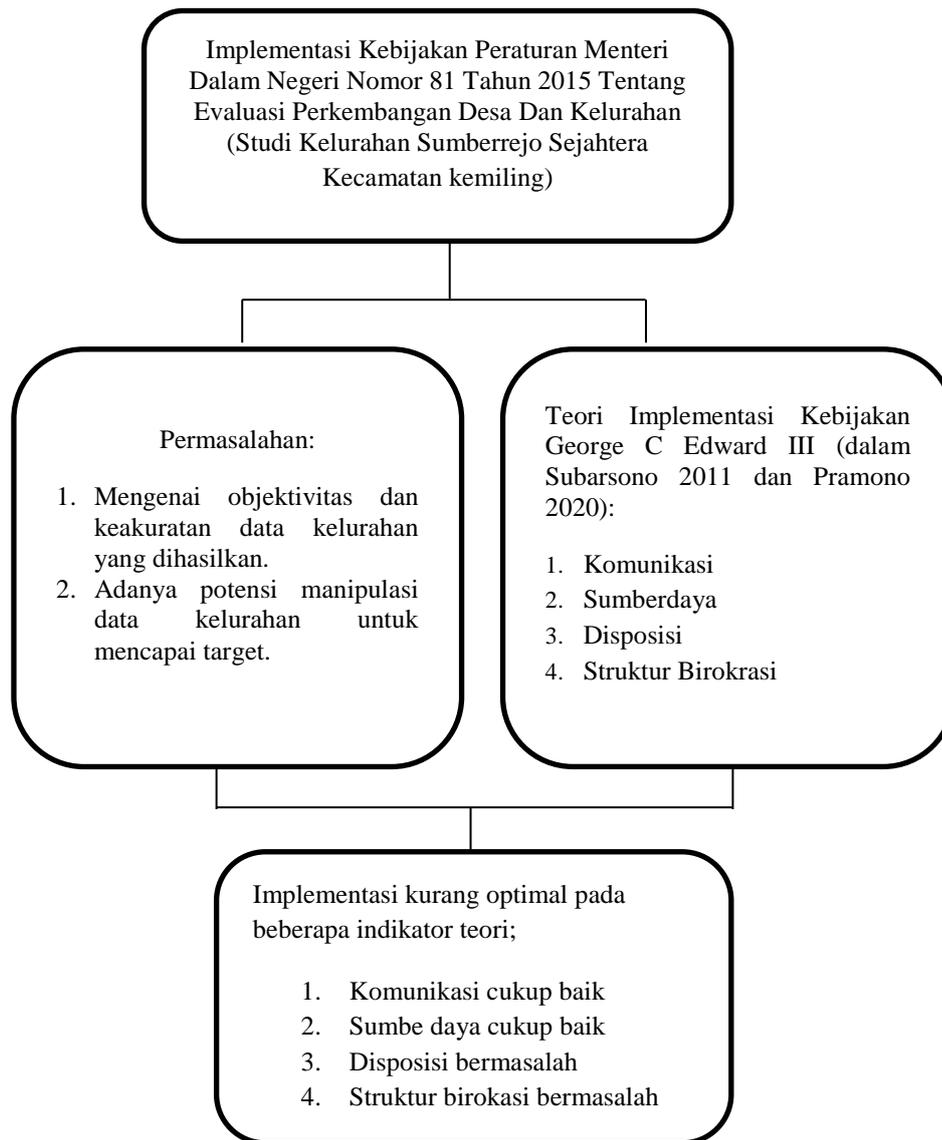
2.2.2 Definisi Perkembangan Desa/Kelurahan

Perkembangan dapat diartikan sebagai “perubahan yang progresif dan kontinu (berkesinambungan) dalam diri individu dari lahir sampai mati” (*The progressive and continuous change in the organism from birth to death*). Menurut F. J. Monks (2001), perkembangan menunjukkan pada “suatu proses kearah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan menunjukkan pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali”. Perkembangan juga dapat diartikan proses yang kekal dan tetap yang menuju kearah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan.

Perkembangan desa/kelurahan merujuk pada perubahan dan kemajuan yang terjadi di tingkat pemerintahan paling bawah di Indonesia. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perubahan sosial, ekonomi, budaya, hingga tata kelola pemerintahan. Menurut Sutoro Eko (2009), perkembangan desa adalah proses perubahan yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya lokal, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Perkembangan desa mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan menurut Riyadi dan Bratakusumah (2003), perkembangan desa/kelurahan adalah upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa atau kelurahan melalui pelaksanaan program-program pembangunan dan partisipasi masyarakat secara aktif.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfungsi sebagai acuan teoritis yang memandu seluruh proses penelitian untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, penelitian ini secara khusus akan menganalisis bagaimana kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan (EPDESKEKEL) diimplementasikan di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling. Pilihan peneliti untuk memfokuskan penelitian pada Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, yang menarik karena terpilihnya mewakili Kota Bandar Lampung dalam lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi meskipun peringkatnya dalam penilaian normatif EPDESKEKEL relatif rendah yaitu ke-62 dari kelurahan di Kota Bandar Lampung. Teori George C Edward III (Subarsono, 2011 dan Pramono, 2020) akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis empat aspek utama dalam proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui analisis mendalam terhadap keempat aspek tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan EPDESKEKEL.



Gambar 2. Kerangka Berpikir
Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan cara menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan teori yang digunakan pada penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan tipe kualitatif lebih cocok untuk mengkaji fenomena yang ada di lapangan dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Tujuannya adalah agar dapat lebih menggali lebih dalam informasi yang aktual berdasarkan pemahaman narasumber atau informan pada saat proses penelitian. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk meneliti pada suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam (Moleong, 2014). Penelitian kualitatif sebagai penelitian untuk memahami kondisi objek yang alamiah, seperti perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan mendeskripsikan realitas yang terjadi mengenai implementasi dari kebijakan *website* Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEL) di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau area di mana penelitian melakukan penelitian pengumpulan data. Lokasi ini dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, untuk menjawab pertanyaan penelitian. (Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti

adalah Kelurahan Sumberrejo Sejahtera. Alasan memilih lokasi ini karena Kelurahan Sumberrejo Sejahtera salah satu kelurahan berkembang yang menempati posisi ke-62 dalam penilaian normatif *website* EPDESKEL di Kota Bandar Lampung dan menjadi perwakilan Kota Bandar Lampung untuk mengikuti lomba desa/kelurahan di Provinsi Lampung. Kemudian, Peneliti juga melakukan penelitian mencari data pendukung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota (PMK) Kota Bandar Lampung. Peneliti memilih PMK Kota Bandar Lampung karena instansi ini memiliki peran penting dalam mengawasi dan membantu pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan pendapat yang di kemukakan oleh Sugiyono (2019), fokus penelitian kualitatif adalah batasan masalah dalam penelitian. Karena terdapat keterbatasan baik tenaga, dana, waktu, dan upaya. Fokus penelitian menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya.

Peneliti menetapkan fokus penelitian berdasarkan nilai temuan dan permasalahan yang terkait dengan teori dan informan. Fokus pada penelitian ini adalah dengan melihat bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang EPDESKEL di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera. Peneliti ini ingin mengetahui apakah implementasi kebijakan telah berhasil mencapai tujuannya dalam memberikan gambaran yang akurat tentang perkembangan desa atau kelurahan. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan, meliputi: penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu

implementasi yang baik pula serta komunikasi yang diterima oleh para pelaksana harus jelas dan tidak membingungkan.

2. Sumber daya

Ketersediaan SDM dan teknologi fasilitas pendukung, meliputi: SDM (staff), memiliki staff yang kompeten di bidangnya agar implementasi berjalan dengan tujuannya. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan serta alokasi dana untuk mendukung operasionalisasi *website*, pelatihan bagi petugas, dan peningkatan kapasitas teknis lainnya.

3. Disposisi

Komitmen dan sikap para pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan. Komitmen kesungguhan untuk menjalankan seluruh tahapan dari bagian implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Tata kelola, prosedur, dan aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Memperjelas alur kerja, koordinasi antar bagian dan fragmentasi birokrasi (pembagian tugas).

3.4 Jenis Data

Data merupakan informasi yang diterima oleh peneliti dalam keadaan belum teruji kebenarannya secara aktual (Sugiyono, 2019). Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019).

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan secara langsung. Data ini dapat berupa data verbal (hasil wawancara), data observasional (perilaku, tindakan), atau

kombinasi keduanya. Informan pada penelitian ini, yaitu Lurah Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Operator Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Sekretaris Dinas PMK Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Pemberdayaan Kelurahan Dinas PMK Kota Bandar Lampung, dan Akademisi Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sekumpulan data pendukung yang telah ada sebelumnya dan diperoleh peneliti melalui media lain sebagai pendukung dalam analisis data primer. Dalam penelitian ini data sekunder berupa karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, artikel, peraturan/undang-undang, dan *website-website* yang memberitakan seputar fenomena terkait objek penelitian yang akan diteliti.

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan berperan sebagai kunci utama dalam mengungkap makna dan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. Sebagaimana diungkapkan oleh Moelong (2014), informan adalah seseorang yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan objek penelitian berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan mereka dalam fenomena yang diteliti. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel penelitian berdasarkan penilaian peneliti terhadap seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam terkait objek penelitian dan relevan dengan permasalahan atau fokus penelitian ini (Sugiyono, 2018). Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* bertujuan untuk mengambil informan secara objektif agar mendapatkan data yang lebih mendalam dan spesifik sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga menurut peneliti *purposive sampling* sangat tepat untuk digunakan dalam meneliti implementasi kebijakan *website* EPDES KEL dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, khususnya di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera

Kecamatan Kemiling. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Data Nama Informan

| Nama | Jabatan |
|----------------------------------|---|
| Bayu, S.Sos. | Lurah Kelurahan Sumberrejo Sejahtera |
| Andi Winarno | Operator Kelurahan Sumberrejo Sejahtera |
| Drs. Syafrilsyah, M.H. | Sekretaris Dinas PMK Kota Bandar Lampung |
| Abdurahman, S.E., M. M | Kepala Bidang Pemberdayaan Kelurahan |
| Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. | Akademisi Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara |
| Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA | Akademisi Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Penggunaan Teknik pengumpulan data yang tepat mempengaruhi hasil akhir sebuah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan terwawancara. Tujuan utama wawancara adalah untuk menggali informasi mendalam mengenai perspektif, pengalaman, dan pemahaman subjek penelitian. Berdasarkan jenisnya, terdapat tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2018). Wawancara terstruktur digunakan ketika peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang

alternatif jawabannya telah disiapkan, kemudian responden diberi pertanyaan yang sama kemudian pengumpul data mencatatnya. Selanjutnya, wawancara semi terstruktur yaitu pelaksanaan wawancaranya menggunakan model yang lebih bebas daripada wawancara terstruktur, narasumber diminta pendapat dan ide-idenya dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbukanamun tetap menggunakan panduan wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas sehingga peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mendapatkan atau pengumpulan data-datanya.

Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan sehingga dalam pelaksanaannya lebih fleksibel dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan mendalam tetapi tetap mempertahankan fokus pada topic utama yang diteliti. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang telah peneliti tetapkan, kemudian direkam menggunakan *handphone*, dan mencatat hasil wawancaranya. Berikut hasil wawancara berdasarkan tanggal dan waktu telah dilakukan oleh peneliti:

1. Pada tanggal 22 Januari 2025, peneliti mewawancarai Bapak Bayu selaku Lurah Kelurahan Sumberrejo Sejahtera pada pukul 12.34 WIB.
2. Pada tanggal 22 Januari 2025, Peneliti mewawancarai Bapak Andi Winarno selaku Staff Operator Kelurahan Sumberrejo Sejahtera pada pukul 11.00 WIB.
3. Pada tanggal 10 Maret 2025, Peneliti mewawancarai Bapak Syafrilsyah selaku Sekertaris Dinas PMK Kota Bandar Lampung pada pukul 11.51 WIB.
4. Pada tanggal 10 Maret 2025, Peneliti mewawancarai Bapak Abdurrahman selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Kelurahan pada Dinas PMK Kota Bandar Lampung pada pukul 11.31 WIB.

5. Pada tanggal 15 April 2025, Peneliti mewawancarai Bapak Dedy Hermawan selaku Akademisi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada pukul 11.17 WIB.
6. Pada tanggal 16 April 2025, Peneliti mewawancarai Bapak Fery Triatmojo selaku Akademisi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada pukul 13.14 WIB.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan (Sugiyono, 2019). Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa waktu, tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, dan peristiwa. Melalui observasi peneliti akan lebih mampu dalam memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, sehingga dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh mengenai implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang EPDESKEL, khususnya pada Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dokumen yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap objek penelitian. Teknik ini juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual terkait masalah yang dijadikan objek penelitian (Sugiyono, 2019). Dokumentasi dapat berbentuk gambar, tulisan maupun karya-karya monumental dari seseorang. Alasan penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data adalah sebagai bukti yang nyata bahwa peneliti telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan menggunakan wawancara

sehingga dokumentasi yang diperlukan adalah foto pada saat melakukan wawancara dengan informan dan memperoleh data maupun jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga penelitian ini didukung oleh dokumen-dokumen seperti sosialisasi EPDES KEL serta modul petunjuk pengisian EPDES KEL.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah mengelola data di atas diperlukan adanya pengolahan data dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang dipakai. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Tahapan pelaksanaan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data

Dalam penelitian ini akan melakukan teknik editing guna memeriksa kembali apakah sudah akurat serta lengkap data yang diperoleh dari informan. Dalam proses ini peneliti akan mencoba membaca kembali kemudian diedit beberapa kalimat yang dirasa perlu dibuang atau yang masih bisa dipertahankan. Tujuannya ialah agar memperoleh peningkatan kualitas data.

2. Klasifikasi

Tahap ini peneliti melakukan proses pengelompokan semua data ke dalam kategori baik primer maupun sekunder. Adanya klasifikasi data tersebut, diharapkan dapat membantu peneliti dalam mengorganisir informasi sehingga proses penelitian lebih terarah.

3. Sistematis Data

Tahap ini data yang telah dikelompokkan disusun secara teratur atau sistematis. Tujuannya untuk mempermudah peneliti dalam menginterpretasikan data sehingga tercipta keteraturan dalam menentukan sebuah jawaban dari inti permasalahan. Metode ini

dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian setelah itu data tersebut dihubungkan dengan teori-teori.

4. Interpretasi Data

Tahap ini peneliti sudah melakukan analisis data dengan teliti dan mendeskripsikan makna dari data yang telah diolah. Interpretasi data dalam penelitian ini, yaitu pembahasan mengenai implementasi kebijakan *website* EPDESKEL dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, khususnya pada Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling. Interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan hasil wawancara dengan informan, teori, atau konsep yang peneliti gunakan pada tinjauan pustaka dan dokumen lainnya. Kemudian, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi data tersebut sebagai hasil dari penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2019) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun tujuan dari analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data melalui pengakuan dari subjek pelukanya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan suatu data yang membutuhkan analisis. Data yang didapatkan dari objek penelitian juga memiliki kaitan yang belum jelas. Oleh karena itu analisis data sangat diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga dapat dipahami secara umum.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019), mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai ketika data atau informasi tidak lagi didapatkan. Berikut proses analisis data pada model Miles dan Huberman yaitu, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi diperlukan dalam penelitian ini karena data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak dan beragam, sehingga hanya informasi penting saja yang dipertahankan. Peran reduksi data dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis data yang relevan sehingga tetap fokus pada inti permasalahan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori yang disusun berdasarkan pengelompokan yang diperlukan sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan menurut Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif dapat berupa grafik, matrik, *network*, dan *chart*. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun bentuk penyajian data dari penelitian ini adalah dengan melampirkan data hasil wawancara berupa kutipan-kutipan langsung.

3. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan yang merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Verifikasi data /kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat dan mudah dipahami. Proses ini perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kebenaran kesimpulan tersebut, terutama yang berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan, dan rumusan masalah. Verifikasi data dalam penelitian kualitatif diharapkan

dapat menghasilkan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi, gambaran suatu objek, hipotesis, atau teori dapat juga berupa hubungan kausal atau interaktif. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti meninjau data yang telah diperoleh dan menganalisisnya dengan menggunakan teori yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Peneliti menganalisis data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif diperlukan guna mengkaji kembali kebenaran data yang didapatkan peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah agar data yang didapatkan peneliti dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu (Lexy J. Moleong, 2013). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Adapun dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas (*credibility*) yang merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan triangulasi, yaitu melakukan pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan waktu.

Secara garis besar triangulasi ada 3 yaitu triangulasi sumber, metode, dan waktu (Lexy J. Moleong, 2013). Triangulasi sumber adalah teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi metode adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan metode yang berbeda. Triangulasi waktu adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda (Aan, 2011). Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber, yaitu

dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan data yang diperoleh dari observasi lapangan dan dokumentasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memverifikasi keabsahan temuan penelitian dari berbagai sudut pandang, sehingga hasil penelitian menjadi lebih terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, simpulan dari penelitian “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Studi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan kemiling), sebagai berikut:

1. Komunikasi

Indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEL) di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, telah berjalan secara efektif. Komunikasi yang dibangun oleh Dinas PMK Kota Bandar Lampung sebagai pihak penanggung jawab, telah mencakup tiga komponen utama yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Proses transmisi informasi dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh melalui berbagai media seperti sosialisasi, pelatihan teknis, surat edaran, dan grup komunikasi digital, yang mempermudah pelaksana dalam menerima arahan kebijakan. Kejelasan komunikasi terlihat dari pemahaman pelaksana terhadap isi dan indikator kebijakan EPDESKEL, yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami serta disertai panduan teknis yang sistematis. Sementara itu, konsistensi komunikasi dijaga dengan baik oleh Dinas PMK melalui penyampaian instruksi yang stabil, serta penjelasan ulang jika terdapat perubahan kebijakan. Konsistensi ini menciptakan kepastian dan kepercayaan bagi pelaksana di tingkat kelurahan dalam menjalankan tugasnya.

2. Sumber Daya

Pada indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEL) di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, dapat

disimpulkan cukup baik, bahwa aspek sumber daya dari aspek sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung, telah tersedia secara baik dan mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Kualitas SDM di kelurahan dinilai cukup kompeten, memiliki tingkat pendidikan yang memadai, serta mampu mengoperasikan sistem digital EPDESKEKEL dengan baik. Selain itu, pembagian tugas yang jelas, budaya kerja yang akuntabel, serta dukungan pelatihan dari pemerintah kota turut memperkuat kapasitas pelaksana di lapangan. Dari sisi fasilitas, ketersediaan perangkat keras, jaringan internet, dan software pendukung telah dipenuhi, sehingga tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan teknis.

3. Disposisi

Pada indikator disposisi dalam implementasi kebijakan EPDESKEKEL sesuai Permendagri No. 81 Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksananya bermasalah. Kebijakan yang seharusnya mencakup integritas, kejujuran, komitmen, dan tanggung jawab merupakan faktor krusial dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara objektif dan akuntabel. Sikap ini tidak hanya penting pada tataran teknis pengisian data oleh aparat kelurahan, tetapi juga sangat menentukan dalam pengambilan keputusan oleh Dinas PMK sebagai penanggung jawab monitoring dan evaluasi. Temuan di lapangan, seperti pemilihan Kelurahan Sumberrejo Sejahtera yang tidak sejalan dengan hasil evaluasi EPDESKEKEL, menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip kejujuran dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat komitmen dari sebagian pelaksana di tingkat kelurahan, masih terdapat celah pada level pengambilan keputusan yang membuka ruang bagi bias dan kepentingan subjektif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada penguatan budaya integritas, keteladanan pimpinan, sistem pengawasan yang aktif, serta mekanisme evaluasi berbasis bukti nyata, agar data yang disampaikan dapat benar-

benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEKEL). SOP berfungsi sebagai pedoman teknis yang menjamin setiap tahapan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai ketentuan serta dapat dievaluasi secara terukur, sedangkan fragmentasi yang terencana memastikan setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik. Dalam implementasinya di Kota Bandar Lampung, SOP telah diterapkan dan pembagian tugas di tingkat kelurahan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (PMK) mulai berjalan secara sistematis. Namun demikian, masih ditemukan tantangan seperti belum optimalnya transparansi dalam proses penunjukan kelurahan unggulan serta lemahnya koordinasi lintas bidang. Oleh karena itu, struktur birokrasi perlu terus diperkuat agar implementasi kebijakan EPDESKEKEL tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang akurat, objektif, dan berkelanjutan dalam mendukung arah pembangunan kelurahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai implementasi kebijakan *website* EPDESKEKEL di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemanfaatan *Website* sebagai Sarana Informasi Publik

EPDESKEKEL sebaiknya dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana informasi publik yang terbuka, tidak hanya untuk kepentingan lomba antar kelurahan. Masyarakat perlu diberikan akses langsung terhadap informasi mengenai perkembangan, capaian, dan penghargaan kelurahan guna mendorong aparatur lebih serius, jujur, dan bertanggung jawab. Transparansi ini juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan

publik serta sarana membangun integritas birokrasi di tingkat kelurahan melalui keterbukaan data.

2. Pelengkapan Eviden (Bukti atau Dokumen Pendukung)

Setiap indikator pencapaian dalam EPDESKEL perlu didukung dengan eviden atau dokumen pendukung yang jelas dan lengkap, seperti dokumentasi pembangunan fisik, partisipasi masyarakat, serta hasil kegiatan. Masih terdapat kekurangan dalam dokumentasi digital yang menyebabkan capaian tidak sepenuhnya terinformasikan secara akurat. Oleh karena itu, evaluasi harus berbasis bukti nyata, tidak hanya laporan administratif, agar hasilnya lebih objektif dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

3. Peningkatan Transparansi dalam Proses Penilaian EPDESKEL

Proses penilaian dalam EPDESKEL masih belum sepenuhnya transparan, khususnya dalam penunjukan kelurahan unggulan yang kerap tidak mencerminkan hasil evaluasi faktual. Penilaian seharusnya dilakukan secara terbuka, dengan indikator dan metode yang jelas serta dapat diakses oleh pihak terkait, termasuk kelurahan yang dinilai dan masyarakat. Selain itu, hasil penilaian sebaiknya dipublikasikan secara berkala dan disertai dengan alasan atau dasar pemilihan agar tidak menimbulkan kesan subjektif dan konflik kepentingan. Transparansi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan terhadap sistem evaluasi yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Affrian, R. (2012). *Kebijakan publik by Eko Handoyo*. Semarang: Widya Karya
- Al-Aslam, D. F. (2022). Implementasi Kebijakan Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan (Studi pada Kantor Kelurahan Eka Jaya). Skripsi. Universitas Jambi
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Pustaka Setia.
- Aziz, H. S. (2023). Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Nganjuk. IPDN.
- Djaali dan Pudji Muljono. (2008). *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Eko, Sutoro. et. al. (2009). *Masyarakat Sipil Mendemokrasikan Daerah: Pelajaran Dari Aceh*. Jakarta: Yappika.
- Hayat. (2017). *Manajemen Kebijakan Publik*. Intrans Publishing
- Herdiana. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: pengertian dan konsep dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*. 13–25
- Iskandar, Jusman. (2012). *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga
- Jones, Charles O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Juharza, A. (2021). Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Sesuai Pemendagri No. 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Studi Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Di Kecamatan Ukui). Skripsi. Universitas Islam Riau.
- KEMENDAGRI, Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan <https://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>. Diakses pada 20 November 2024

- Kraft, M. E & Furlong, S. R. (2020). *Public policy: Politics, analysis, and alternatives*. Cq Press.
- Komariah Aan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yoyakarta: Gava Media.
- Lababa, D. (2008). *Evaluasi program: sebuah pengantar*. Surya Dharma.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remadja Karya.
- Moleong, L. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Monks, F. J. (2001). Back to the roots of gifted education: A European perspective. In *Henry B. and Jocelyn Wallace National Research Symposium on Talent Development., 4th, May, 1998, U Iowa, Iowa City, IA, US*. Great Potential Press.
- Mustafa, K. K., & Deodatus, P. S. (2021). Technology and Immigration System: A New Paradigm for Improving Government Service Delivery in Tanzania. *PanAfrican Journal of Governance and Development (PJGD)*, 2(2).
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. In *Kebijakan Publik*.
- Palupi, G. R., Wahyuningsih, S., & Suharno, S. (2013). Identifikasi permasalahan implementasi pembelajaran pada masa pandemi di sekolah dasar. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(1).
- Rahayu, Pitri. (2014). *Kebijakan Publik*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1(12).
- Ridhawati, E., Fitriani, Y., Sari, D. N., & Pratama, R. (2019). Penerapan E-Goverment Pada Pekon Sukamulya (Studi Kasus: Pekon Sukamulya Pringsewu). *Jurnal Cendikia*, 17(1 April), 246-250.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyady. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Robial, D.F (2015). Peran Pemerintah Kelurahan dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Studi di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7).
- Rukayat. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 11(2).
- Sitokdana, Melkior N.N. (2015). Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintahan Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. *Jurnal Buana Informatika*, 6(4).
- Sosiawan, E. A. (2008). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika*. 1(5).
- Siyoto, Sandu. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Untuk Mendorong Pertumbuhan Pembangunan Daerah Di Indonesia. *Urnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2).
- Van Meter, D. S. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society*.
- Wahab. Abdul. (2008). *Formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wenda, W. L., & Akib, H. (2015). Pembangunan ekonomi dalam era otonomi daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(1).
- Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

- William, David. C. (2008). *Naturalistic Inquiry Materials*. Bandung: FPSIKIP Bandung.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Yola Melinda, Y. (2021). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau).
- Yunanda, M. (2009). *Evaluasi pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang/Peraturan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.